

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika politik Uni Eropa (UE) kini menghadapi krisis baru sejak 2016 silam. Krisis ini disebabkan karena hasil referendum Britania Raya yang memilih untuk keluar dari UE. Merujuk pada data yang dirilis *Electoral Commission* menunjukkan bahwa 51,9% publik Britania Raya memilih keluar dari Uni Eropa dengan perolehan suara *Leave* di dominasi di Inggris (*England*) dan *Wales*.¹ Hasil ini menandai berakhirnya keanggotaan Britania Raya selama 44 tahun di Uni Eropa. Fenomena ini kemudian lebih dikenal sebagai '*Brexit*'.

Hasil referendum ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, khususnya terkait sejumlah krisis di UE. Adapun krisis tersebut seperti Krisis *Eurozone* 2010 dan Krisis Imigran pada 2015 menjadi alasan yang banyak dipilih publik Britania Raya disamping sejumlah masalah terorisme, kedaulatan, hukum, dan kesehatan.² Hasil ini sejalan dengan survei dari Grynberg pada rentang waktu Juni 2016 sampai November 2019 yang menyatakan bahwa isu ekonomi dan keuangan (70%), isu imigrasi (66%), serta isu hukum (52%) menjadi isu dominan yang melatarbelakangi para pemilih opsi *Brexit* selama referendum.³ Hal serupa disampaikan dalam survei lainnya di mana 70% publik menolak keterlibatan UE atas imigrasi dan pengungsi, serta 55% publik

¹ Electoral Commission "Results and Turnout at the EU Referendum" accessed April 8, 2021, <https://www.electoralcommission.org.uk/who-we-are-and-what-we-do/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/results-and-turnout-eu-referendum>.

² Patrick Bijsmans, Charlotte Galpin, and Benjamin Leruth, "'Brexit' in Transnational Perspective: An Analysis of Newspapers in France, Germany and the Netherlands," *Comparative European Politics* 16, no. 5 (September 26, 2018): 825–842, <http://link.springer.com/10.1057/s41295-017-0104-z>.

³ Charlotte Grynberg, Stefanie Walter, and Fabio Wasserfallen, "Expectations, Vote Choice and Opinion Stability since the 2016 Brexit Referendum," *European Union Politics* 21, no. 2 (June 1, 2020): 255–275.

³ Grynberg, Walter, and Wasserfallen, "Expectations, Vote Choice and Opinion Stability since the 2016 Brexit Referendum."

menolak hal serupa atas ekonomi.⁴ Data tersebut menunjukkan bahwa isu ekonomi dan imigrasi, yang turut menyebabkan krisis di UE dan Britania Raya, menjadi alasan publik Britania Raya untuk memilih opsi *Brexit*.

Hal demikian kontras dengan preferensi publik Britania sebelum tahun 2016. Pada masa itu, merujuk pada survei yang dilakukan oleh NatCen Social Research, menunjukkan bahwa responden yang mendukung opsi *Brexit* berjumlah 30% pada tahun 2012. Akan tetapi, dukungan atas *Brexit* cenderung menurun dengan kisaran 25% pada tahun 2013, 23% pada 2014, dan 22% pada tahun 2015.⁵ Perubahan ini turut terjadi pada elit pemerintahan Britania Raya. Sebagai contoh, Perdana Menteri (PM) David Cameron melalui Manifesto Partai Konservatif tahun 2015 menjanjikan kehadiran referendum atas keanggotaan Britania Raya dalam UE paling lambat pada akhir tahun 2017.⁶ Ia menegaskan bahwa inilah saatnya bagi publik Britania Raya untuk menentukan nasibnya sendiri jika UE tidak mengakomodir kepentingan mereka.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa beliau mulai terkesan skeptis dengan UE melalui kehadiran referendum.

Kecenderungan sikap skeptis ini juga terlihat di dalam Partai Konservatif yang merupakan pendukung kabinet sekaligus partai asal dari PM Cameron. Pada manifesto yang sama, Partai konservatif menjanjikan kehadiran referendum paling lambat di akhir tahun 2017.⁸ Selain itu, banyak anggota partai konservatif, menurut Luke Moore, mengalami perubahan posisi yang signifikan menjadi pendukung opsi *Brexit*, di mana proporsi keanggotaan Partai Konservatif di parlemen yang mendukung *Brexit* mencapai 135 (41%) dari total anggota partai itu di parlemen

⁴ Bruce Stokes, *Euroskepticism Beyond Brexit: Significant Opposition in Key European Countries to an Ever Closer EU*, vol. 7, 2016, www.pewresearch.org.

⁵ Swales, Kirby. "Understanding the Vote Leave" *NatCen Social Research*. Technical Report. 2017.

⁶ The Conservative and Unionist Party. *Strong Leadership, A Clear Economic Plan, A brighter, More Secure Future – The Conservative Party Manifesto 2015* (London: St. Ives PLC, 2015), pp: 72-73.

⁷ The Conservative and Unionist Party. *Strong Leadership, A Clear Economic Plan, A brighter, More Secure Future – The Conservative Party Manifesto 2015* (London: St. Ives PLC, 2015)

⁸ The Conservative and Unionist Party, (2015) Pp. 72-73.

yang mencapai 330 anggota,⁹ cukup besar dibandingkan dengan Partai Buruh secara total (232) dan Partai Liberal-Demokrat (8).¹⁰ Berbagai tokoh sentral di Partai Konservatif, yakni Sekretaris Kehakiman Britania Raya, Michael Gove, dan Menteri Ketenagakerjaan Britania Raya, Priti Patel, dan Walikota London pada 2008 hingga 2016, Boris Johnson, memilih untuk memosisikan diri mendukung opsi *Brexit* dan terlibat dalam berbagai kampanye *Brexit*.¹¹

Kecenderungan Partai Konservatif dalam menghadirkan referendum ini mencuat akibat sejumlah kondisi. Pertama, perilaku tersebut berkaitan dengan konservatisme sosial dan populisme, sebagai landasan haluan Partai Konservatif, yang cenderung melihat UE melemahkan kedaulatan Britania Raya melalui pembentukan institusi intra-UE hingga perumusan regulasi.¹² Hal demikian bertentangan dengan ide mereka yang menginginkan adanya pasar bebas yang kemudian memicu perpecahan antara kubu *Hard-Brexit* atau Brexit (keluar dari UE secara penuh) dengan *Soft-Brexit* atau Bremain (tetap menjadi anggota UE namun berada dalam pengecualian tertentu).¹³ Tidak hanya itu, kehadiran isu referendum berikut peningkatan perhatian Britania Raya terhadap UE juga didasarkan pada kehadiran dua krisis di Eropa yang turut berdampak bagi Britania Raya, yakni Krisis Eurozone 2010 dan Krisis Imigran 2015.¹⁴ Terakhir, Media Massa seperti *Daily Telegraph*, *The Sun*, dan *The Guardian* turut menyoroti perkembangan isu krisis, ekspektasi kehadiran referendum, hingga kampanye terkait opsi *Leave*

⁹ Luke Moore, "Policy, Office and Votes: Conservative MPs and the Brexit Referendum," *Parliamentary Affairs* 71, no. 1 (January 1, 2018): 1–27, <http://academic.oup.com/pa/article/71/1/1/3861430>.

¹⁰ Elise Uberoi, *European Union Referendum 2016*, Briefing Paper (Westminster, 2016), <http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7639#fullreport>.

¹¹ Nicholas Watt "Boris Johnson to Campaign for Brexit in EU Referendum" *The Guardian*, February 21 2016 accessed April 8, 2021, <https://www.theguardian.com/politics/2016/feb/21/boris-johnson-eu-referendum-campaign-for-brexit-david-ferguson>.

¹² The Conservative and Unionist Party. *Forward Together: Our Plan for a Stronger Britain and a Prosperous Future— The Conservative Party Manifesto 2017* (London: St. Ives PLC, 2017) pp:1-9.

¹³ Peter Dorey, "Towards Exit from the EU: The Conservative Party's Increasing Euroscepticism since the 1980s," *Politics and Governance* 5, no. 2 (April 5, 2017): 27–40, <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/873>.

¹⁴ Tatiana Coutto, "Half-Full or Half-Empty? Framing of UK–EU Relations during the Brexit Referendum Campaign," *Journal of European Integration* 42, no. 5 (July 3, 2020): 695–713, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07036337.2020.1792465>.

dan *Remain* bagi Britania Raya di dalam UE.¹⁵ Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat upaya menggiring publik Britania Raya untuk memilih opsi *Brexit* pada referendum, yang dikenal sebagai politisasi.

Dari sini, partai Konservatif menunjukkan perubahan pandangan yang cukup signifikan terkait keberadaan Britania Raya dalam keanggotaan UE, yang cenderung semakin skeptis. Perubahan perilaku ini ternyata berimbas pada perubahan perilaku partai ini dalam menanggapi perkembangan integrasi Eropa melalui UE. Selain itu, perubahan pandangan ini turut berpengaruh pada perpecahan di dalam partai Konservatif, kubu *Soft-Brexit* dengan *Hard-Brexit*. Terakhir, kehadiran kedua krisis dan pengumuman kehadiran Referendum oleh Perdana Menteri David Cameron membuat Kampanye *Euro-scepticism*, melalui Partai Konservatif, menjadi cukup intens hingga hasil resmi yang menunjukkan bahwa publik Britania memilih keluar dari UE. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji perilaku partai konservatif ini terkait perubahan dukungan publik tentang keluarnya Britania Raya dari UE pada Referendum 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Hasil Referendum 2016 menunjukkan bahwa mayoritas publik Britania Raya lebih memilih agar negaranya keluar dari keanggotaan UE. Hal demikian justru kontras dengan hasil survei oleh NatCen Social Research, yang hanya 20% responden saja yang mendukung opsi *Brexit* sehingga menunjukkan adanya perubahan orientasi publik Britania Raya terhadap UE. Selain itu, Partai Konservatif menunjukkan tren yang mengarah pada dukungan untuk referendum disertai dengan kemunculan pihak yang mendukung opsi *Brexit* dari Partai tersebut. Perdana Menteri David Cameron menjanjikan untuk menyelenggarakan referendum melalui manifesto Partai Konservatif dan kemunculan tokoh *Brexit* dari partai tersebut, seperti Priti Patel,

¹⁵ David Khabaz, "Framing Brexit: The Role, and the Impact, of the National Newspapers on the EU Referendum," *Newspaper Research Journal* 39, no. 4 (2018): 496–508.

Michael Gove, dan Boris Johnson. Hasil survei oleh Bruce Stokes dan Grynberg menunjukkan bahwa tren kecenderungan elit pemerintahan Konservatif di bawah Perdana Menteri Cameron dan publik Britania Raya menjadi skeptis dan condong ke *Brexit* berkaitan dengan Krisis *Eurozone* 2010 dan Krisis Imigran 2015. Berbagai peristiwa pemberontakan di parlemen dan kampanye menunjukkan adanya politisasi di publik Britania Raya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang diteliti yaitu “Bagaimana politisasi Partai Konservatif melalui Isu Uni Eropa bagi Britania Raya guna memastikan pelaksanaan Referendum Keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa dapat berjalan?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis politisasi Partai Konservatif Britania Raya berjalan dan mendorong publik Britania Raya untuk memilih opsi *Brexit* pada Referendum 2016.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut

1. Manfaat akademis

Manfaat penelitian ini secara akademis meliputi menambah informasi tentang permasalahan dan dinamika politik di Uni Eropa dan tentang hubungan antara politik domestik dan politik internasional dalam terkait upaya integrasi kawasan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengkaji Studi Kawasan, Studi Politik dan Pemerintahan, dan berbagai studi lainnya yang terkait dalam melihat praktik



politisasi dan pengaruhnya bagi perubahan kebijakan politik di dalam dan luar negeri suatu negara.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam menjelaskan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi yang relevan sehingga dapat dianalisis secara mendalam terkait penelitian yang dilakukan. Berbagai penelitian sebelumnya akan menjadi tolak ukur dan landasan dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Beberapa referensi hasil penelitian tersebut antara lain:

Pertama, literatur yang menjadi rujukan penulis adalah artikel berjudul “Mengapa Brexit? Faktor-Faktor di Balik Penarikan Inggris dari Keanggotaan Uni Eropa” oleh Yulyan Maharta Saviar. Artikel ini memuat tiga asumsi penting yang mendasari keluarnya Britania Raya dari keanggotaan UE, yakni sikap kritis Britania Raya secara umum kepada UE, beban ekonomi dan sosial Britania Raya dalam keanggotaan UE, serta dinamika politik domestik dan kehadiran referendum itu sendiri. Dalam artikel tersebut, Saviar meyakini bahwa ketiga faktor itu memainkan peran penting dalam memengaruhi berbagai pihak, terutama publik, dalam memilih opsi *Brexit* dalam referendum.¹⁶ Temuan tersebut berguna dalam penelitian ini dalam menguraikan faktor-faktor *Brexit* secara umum. Akan tetapi, karena pembahasan mengenai faktor-faktor *Brexit* terbatas secara umum, analisis mengenai keterhubungan UE terhadap *Brexit* kurang mendetil dan mendalam sehingga akan diperbaiki melalui penelitian ini melalui temuan dinamika di tingkat UE maupun di tingkat Britania Raya

Kemudian, literatur yang menjadi rujukan penulis adalah artikel karya Liesbet Hooghe dan Gary Marks yang berjudul “A Post-functionalist Theory of European Integration: From

¹⁶ Yulyan Maharta Saviar, “Mengapa Brexit ? Faktor-Faktor Di Balik Penarikan Inggris Dari Keanggotaan Uni Eropa,” *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 6, no. 2 (2017): 258–271, http://repository.unair.ac.id/67835/1/Fis.HI.39.17_Sav.m-JURNAL.pdf.

Permissive Consensus to Constraining Dissensus” yang diterbitkan pada tahun 2009. Artikel ini menjelaskan mengenai hubungan politik di tingkat UE yang semakin responsif dan rentan atas berbagai tekanan publik di tingkat domestik. Tekanan publik ini, lanjutnya, merupakan hasil dari politisasi domestik yang dapat berpengaruh bagi integrasi Eropa kedepannya, yang muncul dari *mismatch* pada perkembangan UE itu sendiri. Politisasi domestik dalam membangun tekanan publik atas UE inilah yang menjadi dasar dari gagasan alternatif dari studi regionalisme, yang dinamai ‘Posfungsionalisme’.¹⁷ Pendekatan ini akan sangat berperan dalam melihat pengaruh perkembangan integrasi Eropa terhadap politisasi tekanan publik oleh aktor politik domestik. Akan tetapi, Liesbet Hooghe dan Gary Marks tidak banyak menyoroti perkembangan di tingkat Eropa itu sendiri dan terpaku pada tingkat domestik sehingga argumentasi politisasi hanya terbatas pada ‘politik domestik’ walaupun menghadirkan integrasi kawasan sebagai pemicu politisasi. Oleh karena itu, penelitian ini hendak memperbaiki celah tersebut dengan mengaitkan perubahan di tingkat UE sebagai faktor penting bagi politisasi dengan lebih detail.

Kemudian, literatur yang turut menjadi acuan adalah artikel berjudul “Can the Politicization of EU Integration be Reserved?” karya Peter de Wilde dan Michael Zürn pada tahun 2012. Selaras dengan sumber sebelumnya, artikel jurnal ini mengupas secara lebih sederhana namun detail dan terarah mengenai pengaruh politisasi terhadap perkembangan integrasi kawasan Eropa. Hal demikian, lanjutnya, didasarkan pada adanya keterkaitan antara peningkatan kewenangan EU secara level, cakupan isu dan inklusivitas terhadap kesadaran, mobilisasi dan polarisasi pada publik mengenai UE ini yang dimotori oleh unit yang dinamakan

¹⁷ Liesbet Hooghe and Gary Marks, “A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus,” *British Journal of Political Science* 39, no. 1 (2009): 1–23.

dengan ‘*political opportunity structure*’.¹⁸ Selain itu, artikel ini membantu dalam memahami politisasi dengan lebih sederhana sekaligus menemukan keterkaitan antara perkembangan UE dengan politisasi aktor domestik atas kemunculan berbagai tekanan publik nasional terhadap UE. Akan tetapi, operasionalisasi konsepnya menghadirkan data dari lintas negara saja tanpa memfokuskan pada isu maupun negara tertentu, sehingga diperlukan pembuktian konsep tersebut pada kasus yang lebih spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini akan berusaha membuktikan operasionalisasi konsep politisasi dengan memfokuskan pada perilaku partai konservatif pada fenomena *Brexit*.

Berikutnya, literatur yang juga menjadi rujukan adalah artikel jurnal karya James A. Caporaso berjudul “Europe’s Triple Crisis and Uneven Role of Institutions: Euro, Refugees, and Brexit”. pada artikel tersebut, Caporaso menganalisis tentang pengaruh tiga fenomena di Eropa terhadap peran UE sebagai institusi. Ketiga fenomena tersebut, yakni Krisis *Eurozone* 2010, Krisis Imigran 2015, dan *Brexit* dinyatakan memiliki keterhubungan satu sama lain, yang didasarkan pada melemahnya peran UE sebagai sebuah institusi kawasan.¹⁹ Akan tetapi, keterhubungan ketiga krisis tersebut kurang mendalam dan memfokuskan pada ketiga pengaruh tersebut (terutama antara *Eurozone* dan Imigran) terhadap hubungan Jerman dan Yunani melalui penerapan Game Theory. Adapun penelitian ini berusaha melihat pengaruh krisis UE melalui konsep politisasi dengan memfokuskan pada hubungan UE terhadap Britania Raya.

Selanjutnya, literatur yang menjadi tinjauan pustaka lainnya adalah artikel jurnal berjudul “UK Euroscepticism and The Brexit Referendum” karya Sofia Vasilopoulou. Dalam artikel itu, beliau membahas mengenai persepsi publik Britania Raya dalam memilih opsi antara tetap di

¹⁸ Pieter de Wilde and Michael Zürn, “Can the Politicization of European Integration Be Reversed?*,” *JCMS: Journal of Common Market Studies* 50, no. SUPPL.1 (March 2012): 137–153, <http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-5965.2011.02232.x>.

¹⁹ James A. Caporaso, “Europe’s Triple Crisis and the Uneven Role of Institutions: The Euro, Refugees and Brexit,” *Journal of Common Market Studies* 56, no. 6 (2018): 1345–1361.

dalam UE (*Bremain*) dengan *Brexit*. Dengan melakukan analisis regresi dengan melibatkan statistik multivariat, Vasilopoulou menyatakan bahwa perilaku pemilih dalam referendum ini memilih berdasarkan pemahaman pribadi mengenai keuntungan dan kerugian Britania dalam keanggotaan di UE. Adapun penilaian pemilih banyak merujuk pada persoalan asas *freedom of movement* yang dinilai merugikan kesejahteraan Britania dan membatasi hak dalam menjaga perbatasannya. Persepsi negatif publik atas hal itulah yang menjadi pendorong dalam memilih opsi *Brexit* pada referendum.²⁰ Akan tetapi, hasil yang diperoleh tidak mengaitkan antara UE, melainkan pada realitas politik Britania saja sehingga perlunya keterhubungan hasil penelitian itu terhadap perkembangan UE yang berada di luar batas nasional Britania Raya, yang nantinya akan diperluas keterhubungan *Brexit* terhadap UE melalui penelitian ini..

Selanjutnya, penulis merujuk pada artikel jurnal karya David Khabaz berjudul “Framing Brexit: The Role, and The Impact, of The National Newspapers on The EU Referendum”. Dalam artikel tersebut, Khabaz menganalisis pengaruh media massa terhadap dukungan opsi *Brexit*. Dengan memfokuskan pada tujuh media massa nasional yang menyatakan dirinya mendukung *Brexit*, beliau menyatakan bahwa terdapat tiga bingkai kampanye utama yang sering disuarakan melalui media massa, yakni *Getting My/Our Country Back*, *Undemocratic EU*, dan *Take Control of Our Own Country*. Hal demikian diperkuat sirkulasi koran harian di Britania Raya yang 82% condong pada kampanye *Brexit*.²¹ Karena didasarkan pada studi Ilmu Komunikasi terkait media massa, argumentasi tersebut masih belum menunjukkan signifikansi pengaruh media massa terhadap perilaku pemilih yang dibutuhkan, yang nantinya akan dikembangkan melalui penelitian ini dengan melihat peran Partai Konservatif melalui media massa cetak.

²⁰ Sofia Vasilopoulou, “UK Euroscepticism and the Brexit Referendum” *The Political Quarterly* 87, no.2 (2016): 219-227.

²¹ David Khabaz, “Framing Brexit: The Role, and the Impact, of the National Newspapers on the EU Referendum” *Newspaper Research Journal* 39, no.4 (2018): 496-508.

Terakhir, artikel yang akan dirujuk adalah artikel Peter Dorey berjudul “Towards Exit from the EU: The Conservative Party’s Increasing Euroscepticism since 1980s”. Dalam artikel tersebut, penulis menemukan bahwa perubahan Partai Konservatif menjadi semakin *Eurosceptic* telah ditandai sejak era Perdana Menteri Margaret Thatcher, yang menentang peningkatan integrasi dari berbagai hal di Eropa karena mengancam ideologi pasar bebas. Dengan memfokuskan pada masa Thatcher hingga Cameron, penulis dapat menemukan titik historis yang menunjukkan perubahan sikap Partai Konservatif yang semakin tidak nyaman atas penguatan dan perluasan UE.²² Karena hanya membatasi pada perubahan kecenderungan Partai Konservatif terhadap UE secara internal, perilaku riil yang terkait kurang dieksplorasi, yang akan dikembangkan melalui penelitian ini dengan melihat perubahan terkini Partai Konservatif melalui indikator *competitive party politics*.

1.7 Kerangka Konsep

Dalam proses untuk menemukan jawaban bagaimana pengaruh politisasi Partai Konservatif terhadap keluarnya Britania Raya dari keanggotaan UE diperlukan kerangka konsep untuk menganalisis dan melakukan penyederhanaan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut :

1.1.1 Politisasi

Konsep politisasi terhadap integrasi kawasan pertama kali dicetuskan oleh Liesbet Hooghe dan Gary Marks. Merujuk pada artikel mereka tahun 2009, mereka menyoroti bahwa di Eropa terjadi perubahan pola integrasi kawasan, dari yang terbatas pada elit negara, yang disebut

²² Peter Dorey, “Towards Exit from the EU: The Conservative Party’s Increasing Euroscepticism since the 1980s,” *Politics and Governance* 5, no. 2 (2017): 27–40.

sebagai *permissive consensus*, menjadi melibatkan publik suatu negara, yang dikenal sebagai *constraining dissensus*. Perubahan tersebut tidaklah spontan, melainkan terdapat aktivitas yang memengaruhi publik ataupun unit politik lainnya, yang dari sini sering diartikan sebagai ‘politisasi’²³.

Pendapat dari definisi politisasi ini sendiri dapat dibilang cukup beragam. Sebagai contoh, Peter de Wilde dan Michael Zürn berpendapat bahwa politisasi adalah upaya untuk dan tindakan yang memiliki keuntungan politis untuk disuarakan kepada publik dan elit suatu pemerintahan agar mengadopsi kebijakan yang menguntungkan tersebut.²⁴ Di sisi lain, Hartwell, dikutip dalam artikel Michał Krzyżanowski, Anna Triandafyllidou, dan Ruth Wodak, menyebut bahwa politisasi merupakan upaya-upaya yang dilakukan agar menghasilkan, “*all questions political questions, all issues political issues, all values political values and all decisions political decisions*”.²⁵ Terakhir, dan yang menarik, Michael Zürn bersama dengan Martin Binder dan Mathias Ecker-Ehrhardt menyebut bahwa politisasi, khususnya terkait dengan keberadaan institusi internasional, merupakan sebuah fenomena meningkatnya kesadaran publik dari suatu institusi internasional dan meningkatnya mobilisasi publik atas pertentangan preferensi politik yang ada dalam kaitannya dengan keberadaan institusi internasional beserta kebijakan dan prosedurnya.²⁶ Secara sederhananya, politisasi ini meliputi adanya upaya disertai perubahan

²³ Hooghe and Marks, “A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus.”

²⁴ de Wilde and Zürn, “Can the Politicization of European Integration Be Reversed?”: 139-140; Michael Zürn, “Politicization Compared: At National, European, and Global Levels,” *Journal of European Public Policy* 26, no. 7 (2019): 977–995, <https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1619188>.

²⁵ Michał Krzyżanowski, Anna Triandafyllidou, and Ruth Wodak, “The Mediatization and the Politicization of the ‘Refugee Crisis’ in Europe,” *Journal of Immigrant and Refugee Studies* 16, no. 1–2 (2018): 1–14, <https://doi.org/10.1080/15562948.2017.1353189>.

²⁶ Michael Zürn, Martin Binder, and Matthias Ecker-Ehrhardt, “International Authority and Its Politicization,” *International Theory* 4, no. 1 (2012): 69–106.

suatu isu menjadi sangat politis dan meningkatkan kesadaran publik terhadap fenomena, kebijakan, maupun prosedur suatu institusi beserta implikasinya bagi publik.

Kemudian, bagaimana politisasi ini bekerja? Penulis merujuk pada konsep politisasi yang digagas Peter de Wilde dan Michael Zürn dalam melihat hubungan institusi internasional (dalam hal ini, institusi kawasan) terhadap perubahan realitas tingkat nasional (dalam hal ini, negara yang menjadi bagian dari institusi atau integrasi kawasan).²⁷ Pertama, terdapat peningkatan atau perubahan otoritas yang dimiliki institusi internasional terkait. Perubahan ini didasarkan pada tiga aspek, yakni adanya perubahan dari level integrasi, cakupan isu, dan inklusivitas antaranggota di dalamnya. Perubahan atas tiga hal itu dapat ditemui dari serangkaian perjanjian yang memperbaharui institusi maupun sikap dan perilaku anggota terhadap perubahan institusi tersebut.²⁸

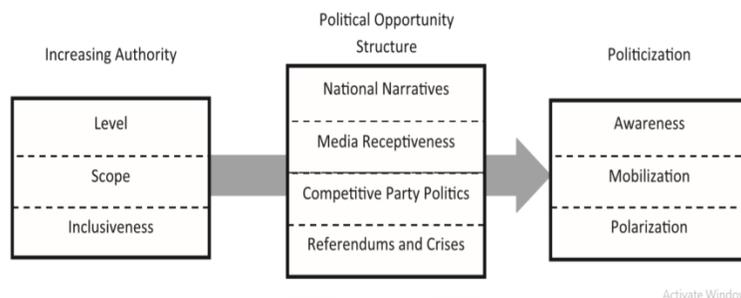
Kedua, berbagai perubahan pada institusi ini akan memicu reaksi pada bagian yang disebut sebagai *political opportunity structure*. Ia dinamakan demikian karena berbagai perubahan tersebut berpengaruh di tingkat nasional yang dapat dimanfaatkan oleh unit-unit di tingkat nasional tersebut untuk meraih keuntungan secara politis. Pada bagian ini, "*political opportunity structure*" meliputi empat hal: terjadinya intensitas dan ambiguitas narasi nasional terkait UE (*national narratives*), meningkatnya pemberitaan media massa atas isu UE bagi negara tertentu (*media receptiveness*), kehadiran isu UE sebagai bagian dari tujuan dan kampanye partai politik di tengah kompetisi politik nasional (*competitive party politics*), dan kehadiran krisis nasional yang berkaitan dengan UE yang diikuti dengan pelaksanaan referendum nasional terkait dengan UE (*referendum and crisis*). Dari empat hal ini, lanjutnya, perubahan pada institusi internasional

²⁷ de Wilde and Zürn, "Can the Politicization of European Integration Be Reversed?": 141.

²⁸ de Wilde and Zürn, "Can the Politicization of European Integration Be Reversed?": 139-141.

ini akan diartikulasikan oleh mereka dalam rangka menjadikannya sebagai peluang bagi politisasi suatu perubahan atau fenomena, terutama yang terkait institusi tersebut.²⁹

Terakhir, berbagai hal yang telah diartikulasikan oleh *political opportunity structure* ini kemudian diterapkan dan memicu politisasi (*politicization*). Adapun indikator terkait apakah terjadi atau tidaknya politisasi ditandai dari tiga hal: meningkatnya kesadaran publik (*awareness*), terjadinya mobilisasi dukungan massa (*mobilization*), dan terjadinya perpecahan di ranah publik (*polarization*).³⁰ Apabila ketiga hal ini terlihat, bisa disimpulkan bahwa fenomena politisasi suatu isu telah terjadi, terlebih ketika terjadi perubahan mayoritas dukungan yang signifikan dari suatu kubu ke kubu lainnya. Adapun tahapan-tahapan tersebut akan digambarkan dalam diagram berikut ini.



Gambar 1.1 Model Politisasi de Wilde & Zürn

Sumber : De Wilde, Peter dan Michael Zürn. "Can the Politicization of EU Integration be Reserved?" *Journal of Common Market Studies*, Vol. 50, No. 51 (2012): 139-141.

Konsep politisasi dari Peter de Wilde dan Michael Zürn ini dipilih karena konsep dianggap memadai dalam menganalisis perilaku Partai Konservatif dalam Referendum Britania Raya 2016. Hal demikian karena konsep ini, berbeda dari Liesbet Hooghe dan Gary Marks, memberi tahapan politisasi yang lebih sederhana namun menghubungkan antara dinamika integrasi kawasan Eropa melalui UE dengan dinamika perubahan pandangan (bahkan kecenderungan

²⁹ de Wilde and Zürn, "Can the Politicization of European Integration Be Reversed?": 142-145.

³⁰ de Wilde and Zürn, "Can the Politicization of European Integration Be Reversed?": 146-149.

memilih) Publik Britania Raya . Selain itu, konsep ini mengakomodasi kehadiran berbagai faktor politik domestik sebagai penghubung antara dinamika UE yang bersifat eksternal dengan dinamika Publik Britania Raya yang bersifat internal, yakni *Political Oportunity Structure*. Sifat *Political Oportunity Structure* yang ‘bebas’ dari campur tangan pemerintahan secara langsung membuat kehadiran aktor domestik (yakni Partai Konservatif) berusaha untuk memengaruhi Publik Britania Raya untuk memilih opsi *Brexit* melalui referendum yang demokratis.

Adapun pada penelitian ini, fenomena Referendum Britania Raya pada tahun 2016 akan dianalisis dengan model politisasi yang digagas oleh Peter de Wilde dan Michael Zürn. Dengan menetapkan Partai Konservatif sebagai agen politisasi dan Opsi *Brexit* (atau *Bremain*) sebagai objek politisasi, penelitian ini hendak menganalisis apakah politisasi di Britania Raya ini berjalan dan memengaruhi publik atau tidak. Penelitian diawali dengan menemukan apakah terjadi peningkatan otoritas institusi internasional (yakni UE di tingkat Eropa), yang diikuti dengan hadirnya *political opportunity structure* di tingkat nasional (Britania Raya). Nantinya, penelitian akan menganalisa apakah terjadi politisasi dengan memfokuskan pada kehadiran atau tidaknya kesadaran, mobilisasi, dan politisasi.

1.8 Metodologi Penelitian

Merujuk pada Peter R. Senn, dalam Jujun S. Suriasumantri, metode merupakan suatu prosedur atau cara dalam mengetahui sesuatu, yang disertai dengan langkah-langkah sistematis. Adapun metodologi, lanjutnya, merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat pada metode tersebut.³¹ Argumentasi dari kedua pihak tersebut membuat penulis berkesimpulan bahwa metodologi ilmiah adalah kajian dan pengkajian terkait peraturan mengenai metode ilmiah.

³¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), 119.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dan mengeksplorasi fenomena-fenomena sosial, peneliti mencoba menerjemahkannya kedalam sebuah gambaran yang kompleks dan menginterpretasikannya ke dalam kata-kata yang kemudian menghasilkan sebuah laporan secara detail dan menyeluruh.³² Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dikutip dari Christopher Lamont, metode ini dinilai tepat dalam menjelaskan fenomena politisasi British Exit pada Referendum 2016 yang didasarkan pada pengumpulan, pemilahan, dan analisis data yang bersumber dari data-data non-numerik, semisal artikel jurnal dan keterangan pers.³³ Terakhir, merujuk pada Mochtar Masoed, analisis penelitian ini akan berupa analisis induksionis. Hal ini karena unit eksplanasi berada di level yang lebih tinggi dari unit analisis.³⁴

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini akan diteliti dengan batasan masalah mulai dari tahun 2010 sampai 2016. Batasan penelitian ini dipilih karena pada masa tersebut, pemerintahan Britania Raya dipimpin oleh PM Cameron dari Partai Konservatif pada tahun 2010 hingga tahun 2015, bertepatan dengan Krisis *Eurozone* 2010 dan Krisis Imigran 2015. Terakhir, Batasan ini dipilih karena waktu pelaksanaan referendum berikut hasilnya terjadi di bulan Juni tahun 2016.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

³² Oleh Tjutju Soendari, "Metode Penelitian Deskriptif," diakses pada 8 Desember 2021 melalui http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-Tjutju_Soendari/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian_Deskriptif.ppt_.pdf.

³³ Christopher Lamont, *Research Methods in International Relations* (London: Sage Publications Ltd., 2015), 78-79.

³⁴ Mochtar Mas'oe'd, "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi," 1990.

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan serta dianalisis dalam sebuah penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah politisasi *Brexit* oleh Partai Konservatif karena dalam penelitian ini akan mendeskripsikan, menjelaskan, serta menganalisis bagaimana partai konservatif, terutama pada kampanye *Brexit*, melakukan politisasi pada publik Britania Raya dalam memilih opsi *Brexit*. Unit eksplanasi merupakan unit yang mempengaruhi perilaku dari unit analisis.³⁶ Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah perkembangan Krisis *Eurozone* 2010 dan Krisis Imigran 2015 yang mendorong Partai Konservatif untuk melakukan politisasi.

Level analisis dapat ditemukan dengan adanya penentuan unit analisis dan unit eksplanasi yang tepat, seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Mochtar Masoed. Merujuk pada Stephen Andriole, level analisis dapat dirujuk melalui lima tingkatan: 1) *the individual level*; 2) *the group level*; 3) *the composite group (or state) level*; 4) *the inter- and/or multi-state level*; and 5) *the global systemic level*. Adapun penelitian ini akan menggunakan level analisis di tingkat kelompok karena penelitian ini melihat politisasi isu UE terbatas pada Partai Konservatif di Britania Raya.³⁷

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mendasarkan pada temuan dari jenis data sekunder seperti artikel jurnal terakreditasi nasional dan internasional, portal berita internasional resmi (*British Broadcasting Company, The Sun, Daily Telegraph*, dsb.), buku, laporan resmi dari badan-badan berwenang di Britania Raya dan Uni Eropa, dokumen resmi partai, hingga postingan dari akun resmi tokoh politik dari Partai

³⁵ Christopher Lamont, *Research Methods in International Relations* (London: Sage Publications Ltd., 2015), 34-39.

³⁶ Mas'oed, "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi." 39-42.

³⁷ Stephen J. Andriole, "The Levels of Analysis Problems and the Study of Foreign International, and Global Affairs: A Review Critique, and Another Final Solution," *International Interactions* 5, no. 2-3 (1979): 113-133.

Konservatif di media massa maupun media sosial, terutama Twitter.³⁸ Berbagai data dikumpulkan dengan menggunakan kata kunci “Partai Konservatif Britania Raya”, “*British Exit*”, “Uni Eropa”, “politisasi krisis kawasan”, “opini publik Britania Raya”, dan “posfungsionalisme” sehingga data lebih mudah ditemukan.

Pada penelitian ini, data utama yang menjadi sumber adalah data yang terdapat dari badan resmi di Britania Raya dan Uni Eropa yang relevan mengenai perkembangan integrasi kawasan, Krisis *Eurozone* 2010, Krisis Imigran 2015, hingga survei mengenai opini publik mengenai UE dan kampanye Referendum 2016. Setelah itu, penulis akan mendasarkan analisis dari berbagai data yang ditemui melalui argument-argumen dari artikel jurnal dan buku. Adapun pernyataan partai maupun anggota partai akan menjadi data pendukung.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh penulis melalui berbagai macam sumber. Selanjutnya, data tersebut akan diolah dengan memahami, mencatat, memilah informasi yang relevan dengan topik yang diteliti serta valid dalam penulisannya. Selanjutnya, data yang telah didapatkan akan disusun merujuk pada tiga aspek dari konsep politisasi (*Increasing Authority*, *Political Opportunity Structure*, dan *Politicization*), lalu menafsirkan berbagai informasi yang ada dan mendeskripsikannya. Data yang diolah dan dicocokkan ke dalam tiga aspek tersebut kemudian akan dianalisis secara berurutan guna menemukan keterhubungan kausalitas dari masing-masing aspek yang memicu politisasi di masyarakat Britania Raya yang berakhir pada hasil Referendum 2016 yang memilih opsi *Brexit*. Pada bagian *Increasing Authority*, penulis menggunakan sumber dari badan-badan di UE (*European Parliament*, *European Commission*, *Eurostat*, dsb.) maupun laporan terkait dari

³⁸ Bakry dan Umar Suryadi, Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional, 28.

badan independent dan media massa guna melihat perkembangan UE berikut krisis Eurozone dan Imigran beserta perilaku Partai Konservatif di tingkat Eropa. Pada bagian *political opportunity structure*, penulis akan mengelaborasi keempat elemen tersebut dengan mengidentifikasi isu-isu yang banyak digunakan oleh Partai Konservatif di ranah parlemen, publik secara langsung, maupun pemanfaatan media massa dan media lainnya melalui analisis dari penulis lainnya maupun laporan independen. Nantinya, pada bagian *politicization*, penulis akan mengidentifikasi relasi antara isu yang diangkat dengan respon publik langsung yang dikutip dari berbagai sumber, hasil analisis dari berbagai penulis lainnya terhadap perilaku pemilih, hingga temuan dari hasil survei badan pusat statistik (*Official National Statistics*), badan pemerintahan lainnya (*House of Commons, House of Lords, Ministry of Public Affairs*, dsb.), maupun laporan survei dari badan independent maupun media massa.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan memuat alasan peneliti melakukan analisis terhadap bagaimana politisasi Partai Konservatif terhadap publik Britania Raya pada Referendum 2016. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori dan konsep, metodologi serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II Dinamika Partai Konservatif terhadap Perkembangan Hubungan Britania Raya dan Uni Eropa

Bab ini akan memuat pembahasan mengenai Dinamika Partai Konservatif terhadap percaturan politik di Britania Raya. Pembahasan dinamika tersebut akan diawali dengan pembahasan sejarah awal dan ideologi Partai Konservatif. Setelahnya, bab ini membahas mengenai strategi partai dan perilaku secara umum Partai Konservatif di Parlemen, Media Massa, dan Publik.

BAB III Perkembangan Integrasi Kawasan di Uni Eropa pada Krisis Eurozone 2010 dan Krisis Pengungsi / Imigran 2015

Bab ini akan memuat tentang perkembangan EU sejak era EC di tahun 1970 hingga kemunculan dua krisis di Eropa, yakni Krisis *Eurozone* 2010 dan Imigran 2015, perilaku Partai Konservatif di UE maupun di Britania Raya. Bab ini memulai pembahasan pada perkembangan integrasi Kawasan Eropa secara umum hingga kehadiran *Maastricht Treaty* dan *Lisbon Treaty*, Perkembangan integrasi moneter melalui skema *European Monetary Union* (EMU) beserta krisis *Eurozone* 2008 hingga Krisis Yunani, dan Kehadiran Schengen Area dan kontribusinya atas Krisis Imigran 2015.

BAB 1V Politisasi Isu terkait Uni Eropa oleh Partai Konservatif Pada Referendum 2016

Bab ini akan memuat analisis dari masalah penelitian mengenai upaya Partai Konservatif dalam mendorong perilaku pemilih menjelang referendum untuk memilih Brexit. Dengan mendasarkan masa pra-kampanye, pengumuman kampanye referendum pada 20 Februari 2016, hingga hari pemungutan suara pada

23 Juni 2016, penulis menganalisis perubahan tersebut dengan mendasarkan pada tiga hal: *Awareness*, *Mobilization*, dan *Polarization*.

BAB V Penutup

Bab ini mencakup ringkasan dari keseluruhan pembahasan peneliti di setiap bab sehingga dapat mengambil kesimpulan dari pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini beserta saran yang diperlukan.

